

HAKIKAT MULTIKULTURALISME DALAM MEMPERKOKOH IDENTITAS NASIONAL

Nining Suryaningsih Yafendi¹⁾, Sitti Maryam²⁾

Universitas Patempo Makassar^{1,2}

Email: sitti.patajai@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian Penelitian ini menggunakan suatu metode penelitian *library reseach* atau studi kepustakaan. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk atau istilah masyarakat modern multikulturalisme. Pada hal, multikulturalisme merupakan suatu paham, bahwa kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam pergaulan hidup masyarakat. Multikulturalisme harus memenuhi tiga syarat berupa adanya interaksi, keterbukaan dan pembelajaran. Di samping itu, multikulturalisme menghadapi tantangan karena kulturasi budaya, yang berakibat bergesernya nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya Indonesia sebagai bangsa majemuk, karena memiliki ragam, suku, agama, bahasa, adat dan budaya, bergabung dan berkolaborasi antara satu dengan lainnya, sehingga terbentuk suatu identitas nasional Indonesia.

Kata kunci: Identitas, Nasional, Multikulturalisme, Memperkokoh

ABSTRACT

This study uses a library research method or literature study. Indonesia is known as a pluralistic nation or the term modern multicultural society. In fact, multiculturalism is an understanding that culture emphasizes acceptance of the reality of diversity, plurality, and multiculturalism that exist in social life. Multiculturalism must meet three requirements in the form of interaction, openness and learning. In addition, multiculturalism faces challenges due to cultural acculturation, which results in the shifting of Pancasila values as the identity of the Indonesian nation. Furthermore, Indonesia as a pluralistic nation, because it has a variety of tribes, religions, languages, customs and cultures, joins and collaborates with each other, so that an Indonesian national identity is formed.

Keywords: Identity, National, Multiculturalism, Strengthening

PENDAHULUAN

Secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta diapit oleh dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang merupakan kawasan paling strategis di dunia dalam kanca percaturan ekonomis, politik mau budaya. Di samping itu, Indonesia juga dikenal sebagai Negara kepulauan yang memiliki 17.504 (tujuh belas ribu lima ratus empat) pulau dan dua pertiga dari wilayahnya berupa laut yaitu 6,32 km² (enam koma tiga puluh dua juta kilometer persegi). Berkenaan dengan hal tersebut, maka patut dan wajar pemerintah mengatur secara tegas berkenaan dengan wilayah Indonesia, termuat dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Regulasi dimaksud bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus sebagai payung hukum berkenaan wilayah kepulauan Indonesia yang harus dijaga, dilindungi dan dipertahankan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. (NKRI).

Negara Indonesia juga dikenal sebagai bangsa yang majemuk, karena

masyarakatnya memiliki beragamnya etnis, suku, agama, bahasa, budaya dan adat istiadat. Berkenaan dengan budaya, maka pemerintah kerja sama dengan masyarakat dan swasta perlu mempertahankan kemajemukan sebagai upaya melestarikan budaya bangsa sebagai salah satu identitas bangsa Indonesia, dengan somboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sejalan ungkapan Ida Bagus Brata (2019) bahwa, walaupun Indonesia merupakan Negara berpenduduk sangat majemuk, tetapi secara moril dipersatukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan semboyannya “Bhinneka Tunggal Ika” (Berbeda Namun Satu Juga).

Selanjutnya pada pasca modern dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, maka istilah kemajemukan oleh masyarakat disamakan dengan multikulturalisme yang dipahami berbagai macam budaya masyarakat. Sedangkan budaya-budaya tersebut, berasal dari kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat dengan memiliki latar belakang yang berbeda antara satu dengan lainnya, Selanjutnya identitas nasional merupakan perwujudan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek dalam kehidupan dengan memiliki ciri khas yang dapat membedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional yang terbentuk dari nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat tumbuh dan berkembang dalam sifat kemajemukan.

Kemudian terkait konsep multikulturalisme, hakikatnya merupakan suatu paham atau gerakan memperjuangkan kehidupan bersama atau kesetaraan yang harmonis dan saling menghargai dan menghormati dalam satu tatanan masyarakat berbangsa dan bernegara. Di samping itu, masyarakat multikulturalisme atau kemajemukan juga menghadapi tantangan, dan/atau komplik, akibat dari pola, perilaku dan tingkah laku serta cara pandang sebagaimana masyarakat yang tidak menerima adanya kesetaraan dan persamaan dalam kemajemukan. Oleh karena itu, pemerintah bukan saja memahami kemajemukan, perlu ada pengakuan dan perlindungan hukum atas hak keragaman dan komunitas budaya.

METODE

Penelitian ini menggunakan suatu metode penelitian *library reseach* atau studi kepustakaan, dilakukan dengan serangkaian kegiatan menggunakan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan yang relevan dengan penelitian dimaksud. Dalam penelitian ini data-data didapatkan dari berbagai sumber seperti buku referensi, buku-buku teks, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dokumen, dan sumber-sumber lainnya. Metode penelitian merupakan instrument yang dipergunakan oleh ilmuan dalam melaksanakan penelitian, sehingga dapat menemukan suatu kebenaran ilmiah. Kemudian adapun objek penelitian kepustakaan merupakan penelaan terhadap data-data pustaka atau literatur yang tersedia, terutama dari buku, artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah, sehingga dapat memberikan solusi atau jawaban terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian kepustakaan berisi konsep dan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Multikulturalisme dan Identitas Nasional

A. Multikulturalisme

Secara etimologis, multikultural ataupun multikulturalisme berasal dari kata “multi” yang berarti plural atau berjenis-jenis (banyak), “kultur” berarti budaya, menurut (Kansil 2011 :218) bahwa, budaya diartikan sebagai keseluruhan sistem

berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan (*belief*) manusia yang dihasilkan masyarakat. sedangkan “isme” berarti paham atau aliran. (Tilaar,2011: 82) Istilah multikultur pada awalnya merujuk kepada istilah multikulturalisme atau multiculturalism yang pertama kali dipopulerkan di Kanada dan digunakan sebagai sinonim dari istilah pluralism atau pluralisme (kemajemukan). Di Indonesia sendiri lebih sering digunakan dengan jargon bhinneka tunggal ika untuk menunjukkan keragaman suku, agama, dan ras.(Ubadah 2022 : 21-22).

Selanjutnya menurut Tilaar (2004:83) multikulturalisme memiliki dua ciri utama, yaitu (a) kebutuhan terhadap pengakuan (*the need of recognition*); dan (b) legitimasi keragaman budaya atau pluralisme budaya. Sementara Parekh yang dikutip (Azyumardi Azra 2003:41) menyebutkan multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijaksanaan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu, multikulturalisme pada hakikatnya merupakan gerakan memperjuangkan kehidupan bersama yang harmonis dan saling menghargai dalam satu tatanan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam konteks multikulturalisme (Brian Fay 1998:7) menekankan ada tiga syarat multikulturalisme yaitu a) adanya interaksi (*interaction*) antar kelompok, b) keterbukaan (*openness*), dan d) pembelajaran (*learning*). Selanjutnya (Budianta 2003) mengisyaratkan pentingnya empati, a) solidaritas, dan b) keadilan sosial untuk mewujudkan masyarakat multikultural dalam arti bahwa baik kaum mayoritas maupun yang minoritas dituntut harus bersifat terbuka, c) menghormati satu sama lain, dan d) mau belajar dari kelompok lain, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian dan keadilan dalam masyarakat. (Ida Bagus Brata).

Di samping itu, keragaman budaya tersebut apabila tidak dapat dikelola dengan baik, berpotensi untuk menimbulkan disintegrasi bangsa. Menurut (Sjamsi Pasandaran 2015 : 36) mengungkapkan, bahwa pengalaman empirik selama ini menunjukkan adanya bahaya-bahaya disintegrasi bangsa yang dipicu oleh gesekan-gesekan yang bersifat rasial. Teramati realitas mengenai pencideraan terhadap budaya, seperti perusakan hak hidup komunitas minor, konflik horisontal yang terjadi di berbagai daerah, dan kebijakan pengelolaan kebudayaan yang dilakukan dalam keseragaman yang represif. Berbagai realitas pencideraan budaya tersebut merefleksikan lemahnya pengakuan terhadap keragaman budaya yang ada. Tidak cukup hanya memahami akan adanya keragaman budaya. Tetapi yang sangat diperlukan adalah pengakuan atau yang oleh *Charles Taylor* disebut dengan *The politic of recognition* terhadap keragaman budaya yang dimiliki oleh setiap komunitas budaya. Lemahnya pengakuan terhadap keragaman hak komunitas budaya tersebut menyebabkan ketidakadilan.

B. Identitas Nasional

Bahwa setiap Negara yang merdeka dan berdaulat, tentu berupaya semaksimal untuk memiliki suatu identitas nasional yang merupakan pembeda dengan bangsa lain. Identitas nasional dapat disamakan dengan identitas kebangsaan. Proses pembentukan identitas nasional umumnya membutuhkan waktu dan perjuangan panjang di antara warga Negara bersangkutan. Menurut Ramlan Subenti dikutip oleh Winarno 2011 : 32-34), bahwa proses pembentukan bangsa-bangsa membutuhkan identitas-identitas untuk menyatukan masyarakat bangsa bersangkutan. Selanjutnya beliau mengungkapkan, bahwa faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa, meliputi primordial (ikatan kekerabatan atau darah atau keluarga), sakral (kesamaan agama yang dipeluk/dianut) oleh masyarakat, tokoh (kepemimpinan), bhinneka tunggal ika (kesediaan bangsa untuk bersatu), sejarah menyatukan diri, perkembangan ekonomi dan kelembagaan. Selanjutnya Pancasila adalah jati diri bangsa (Kaelan, 2002 :46). Sedang jati diri itu

mencakup tiga unsur yaitu kepribadian, identitas, dan keunikan. Pancasila sebagai jati diri bangsa lebih dimaknai sebagai kepribadian (sikap dan perilaku yang ditampilkan manusia Indonesia) yang mencerminkan lima nilai Pancasila. Pancasila memiliki susunan yang merupakan suatu kesatuan yang utuh serta bersifat dasar dan mutlak. (Sitti Maryam, dkk, 2020 :5). Pancasila dipahami bukan rumus atau statusnya tetapi pada isinya, yakni nilai-nilai luhur yang diakui merupakan pandangan hidup bangsa yang disepakati. Pancasila yang seharusnya sebagai sumber nilai, dasar moral etik bagi Negara dan aparat pelaksana Negara dalam kenyaataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik, semua kebijaksanaan dan tindakan penguasa mengatas namakan Pancasila.

Pada hakikatnya Identitas nasional dalam suatu bangsa dikenal ada yang bersifat buatan dan bersifat sekunder serta bersifat primer Identitas nasional bersifat buatan terbentuk karena dibuat dan dibentuk selanjutnya lalu disepakati oleh warga masyarakat setelah bernegara. Berkenaan dengan hal dimaksud, dapat dipahami, bahwa karakteristik suatu identitas nasional adalah manifestasi dari nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek hidup dan kehidupan suatu bangsa. Selanjutnya karakteristik identitas nasional tersebut, ada yang dibawa sejak lahir bersifat *ascriptive* (etnik) dan ada pula yang bersifat alamiah (suku bangsa) Namun sangat disayangkan, Karena dewasa ini karakteristik nasional Indonesia sedang tercabik-cabik sehingga kehilangan keindahannya. Dahulu dikenal sebagai *het zachste volk ter aarde* dalam pergaulan antar bangsa, sekarang mengalami krisis multi dimensi menyebabkan terjadinya instabilitas berkepanjangan. (Sitti Maryam, 2022 :88).

Kemudian Indonesia dikenal bangsa yang majemuk, yang memiliki beracama, suku, agama, bahasa, adat dan budaya, bergabung dan berkolaborasi satu dengan lainnya sehingga terbentuk suatu identitas nasional Indonesia. Adapun unsur-unsur identitas nasional dimaksud (Syahrial Syarbaini, 2009 :68) meliputi :

1. *Suku Bangsa*; tersebar dalam berbagai pulau dan daerah memang sudah ada sejak lahir dengan tidak kurang dari sekitar 300 kelompok etnis yang mempunyai corak dan dialek bahasa. Contohnya; suku Jawa, suku Betawi, suku Madura, suku Dayak, suku Melayu, suku Bugis, suku Makassar, suku Tator, dan lain sebagainya.
2. *Agama*; bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat agamais sehingga *the fouding father* bersepakat menetapkan sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun agama yang tumbuh dan berkembang dalam wilayah nusantara, antara lain; agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Namun pada masa Orde Baru Kong Hu Cu tidak diakui sebagai agama resmi, tetapi pada masa Abdurrahman Wahid istilah agama resmi negara dihapuskan.
3. *Kebudayaan*; merupakan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya berupa perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan sebagai penunjuk dalam bertindak. Misalnya; *Siri' na Pacce* bagi masyarakat Bugis-Makassar, pelaksanaan *Maudu Lompoa* bagi masyarakat Cikoang Kabupaten Takalar, *Addeppo* atau *Addangang* bagi masyarakat adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba, *A'bissa Pusaka Kalompoang* bagi masyarakat Makassar di Kabupaten Gowa.
4. *Bahasa*; dipahami sebagai sistem perlambangan yang secara arbiter dibentuk dari unsur-unsur bunyi ucapan manusia, serta dipergunakan sebagai sarana berkomunikasi dan berintegrasi antar manusia, seperti; bahasa Jawa, bahasa Mandar di Sulawesi Barat, bahasa Melayu di Sumaatera, bahasa Tolaki di Kendari, bahasa Dayak di Kalimantan, bahasa Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan, bahasa Ambon di Maluku, dan sebagainya.

Bahwa dari keempat unsur-unsur identitas nasional di atas, maka lebih lanjut dapat dirumuskan menjadi 3 bagian sebagai berikut :

1. Identitas Fundamental yaitu Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, dasar Negara dan idiologi Negara;
2. Identitas Instrumental yaitu UUD 45 dan Tata perundang-undangan. UU. No.12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Perundang-Undangan. Secara konstitusional. Identitas nasional terlihat dengan jelas dalam rumusan :
 - a. Pasal 32 UUD 1945 pada :

Ayat (1) berbunyi; “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Ayat (2) berbunyi, “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”.
 - b. Pasal 35 UUD 1945, bahwa “Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih”.
 - c. Pasal 36 UUD 1945, bahwa “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”.
 - d. Pasal 36A UUD 1945, bahwa “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”.
 - e. Pasal 36B UUD 1945, bahwa “Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.

3. Identitas Alamiah yang meliputi Negara kepulauan dan pluralisme atau kemajemukan dalam suku, bahasa, budaya dan agama serta kepercayaan..

Di samping itu, unsur-unsur identitas nasional yakni; unsur fundamental, instrument dan secara alamiah, sebagai tali pemersatu bangsa, kekayaan dan kebanggaan bangsa yang diikat dalam bhinneka tunggal ika. Namun dengan perkembangan dan arus globalisasi, sehingga dapat berpengaruh positif maupun negatif terhadap warga masyarakat, dan kalau pengaruh negative tidak segera diantisipasi akan menyebabkan hilangnya sifat patriotis, nasionalisme masyarakat, karena tidak bangga lagi kepada bangsa dan negaranya sendiri, tidak cinta budaya bangsanya, produk dalam negeri dan lebih bangga menggunakan identitas Negara lain. Sebagaimana diungkapkan oleh (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2016 : 43-45). Fenomena-fenomena yang menjadi tantangan identitas nasional tersebut, antara lain :

1. Lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara (contoh; rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lain-lain).
2. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari (perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain-lain).
3. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar (lebih menghargai dan mencintai bangsa asing daripada bangsa sendiri, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain, dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk bangsa lain daripada produk bangsa sendiri, dan lain-lain).
4. Lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah-putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia, dan lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri.
5. Menyukai simbol-simbol asing daripada lambang/simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri.

Selanjutnya berbeda apa yang diungkapkan Syahril Syarbaini,(2009 :69), bahwa dalam era globalisasi, teknologi dan komunikasi dapat berpengaruh pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Dalam hal pergaulan antar bangsa semakin kental terjadinya proses akulturasi budaya yakni saling meniru dan saling mempengaruhi antara budaya masing-masing. Lebih lanjut diungkapkan, bahwa lunturnya tata nilai dan jati diri bangsa Indonesia sebagai akibat dari pengaruh globalisasi, dapat ditandai

dari dua faktor, sebagai berikut :

1. Semakin menonjolnya sikap individualistis yaitu mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, hal ini bertentangan dengan asas gotong royong.
2. Semakin menonjolnya sikap materialistis yang berarti harkat dan martabat kemanusiaan hanya diukur dari hasil atau keberhasilan seseorang memperoleh kekayaan. Hal ini bisa berakibat bagaimana cara memperolehnya menjadi tidak dipersoalkan lagi, bila hal ini terjadi berarti etika dan moral telah dikesampingkan.

Bertolak dari ungkapan di atas, maka pemerintah, masyarakat dan swasta, bekerja sama menyadarkan kembali warga bangsa Indonesia terhadap pentingnya identitas nasional dan memfasilitasi serta mendorong warga negara agar memperkuat identitas nasional. Menumbuhkan bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yakni Pancasila. Selanjutnya upaya pembangunan dan pembinaan integritas nasional sangat perlu dilakukan, hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan tingkat kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa yang diinginkan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka persatuan dan kesatuan bangsa dapat menjamin terwujudnya negara yang makmur, aman dan tenteram. merupakan hasil yang dicapai melalui program penguatan akr multikultural, serta pelaksanaan pembangunan dan pembinaan integritas nasional.

Kesimpulan

Era globalisasi merupakan salah satu era sekaligus sebagai tantangan yang harus dihadapi, dimana terbentuk akulturasi budaya yang dapat mempengaruhi jati diri bangsa Indonesia. Pada masyarakat modern, dikenal multikulturalisme sering mempersamakan keadaan kemajemukan. Kemajemukan dipahami sebagai adanya berbagai macam budaya pada suatu wilayah atau masyarakat yang dijadikan sebagai salah satu jati diri bangsa. Sedang multikulturalisme merupakan suatu paham yang memperjuangkan kehidupan bersama yang harmonis dan saling menghargai dalam satu tatanan masyarakat berbangsa dan bernegara. Berkenan multikulturalisme memiliki tiga syarat yaitu adanya interaksi (*interaction*) antar kelompok, keterbukaan (*openness*), dan pembelajaran (*learning*). Dan pada dasarnya dalam pandangan dunia, multikulturalisme kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijaksanaan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.

Identitas nasional biasa juga disebut dengan identitas kebangsaan. Adapun faktor-faktor terbentuknya identitas nasional yakni, meliputi primordial, sakral, tokoh bhinneka tunggal ika, sejarah, perkembangan ekonomi dan kelembagaan. Selanjutnya tantangan identitas nasional .dalam era globalisasi, antar lain; luntarnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur, Semakin menonjolnya sikap individualistis dan Semakin menonjolnya sikap materialistis. Oleh karena itu, pemerintah, masyarakat dan swasta perlu bekerja sama, menanamkan sifat nasionalisme dan patriotisme terhadap warga masyarakat serta menanamkan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekwen serta mentaati aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani Sri Rahayu, 2017. *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Brata, I. B. (2019). Menyama Braya: Refleksi Multikulturalisme Memperkuat Identitas Nasional. *Media Bina Ilmiah*, 13(8), 1493-1500.
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta.
- Kansil, 2002 Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Paradigma, Yogyakarta.
- La Niampe, 2018. *Revolusi Mental Zaman Kesultanan Buton Abad XIX (Pesan-Pesan Peradaban untuk Indonesia dan Dunia)*. Ocenia Press, Kendari .
- Sayidiman Suryohadiprojo, 2001. *Integrasi Bangsa*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sitti Maryam, Dkk., 2020. *Urgensi Pendidikan Pancasila pada Perguruan Tinggi*. Tallasa Media, Gowa.
- Sjamsi Pasandaran, 2015. Penguatan Komitmen Akademik Dalam Memperkokoh Jati Diri PKN, Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Departemen Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- SUPARLAN, Parsudi. Menuju masyarakat Indonesia yang multikultural [online]. 2002.
- Syahrial Syarbaini, 2010. *Implementasi Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Tilaar., H.A.R., 2007. *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ubadah, 2022, Pendidikan Multikultural: Konsep, Pendekatan, dan Penerapannya dalam Pembelajaran, Pesantren Anwarul Qur'an, Palu Sulten.
- Winarno, 2011, Pendidikan Kewarganegaraan, Sinar Grafika Offset. Jakarta.